

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau

RENI FARWITAWATI¹; MASIRUN²; SOUVYA FITRHRIE³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : souvyafithrie@gmail.com

Abstract: The phenomenon of the rapid change in the information system platform (e-planning) used in regional development planning has an impact on the achievement of evaluation assessments of the Accountability and Performance Report of Government Agencies (LAKIP) of the Regional Development Planning, Research and Development Agency of Riau Province. This study aims to examine and analyze the effect of executive management support, human resources (HR), and information technology on the implementation of planning information systems in the Riau Province government. This research uses descriptive quantitative research methods. The respondents of this research are planning functions in each regional apparatus in the OPD in Pekanbaru City. The data was then analyzed using SmartPLS version 3.2.1.m3. The results of this study are proven that the support of executive management, human resources and information technology has a significant effect on the implementation of planning information systems in the Riau Province government.

Keywords: *Executive Management Support, Human Resources, Information Technology, Planning Information System*

Penyusunan Perencanaan Pembangunan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas serta fungsinya. Dan penerapan ini juga menimbulkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data/ informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bahan penentu/ perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi, saat ini pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi agar dapat memberikan data/

informasi pembangunan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan informasi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemerintah. Kemajuan teknologi informasi sangat diperlukan dan dapat dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan yang ideal, maka di era otonomi daerah ini diwujudkanlah pemerintahan yang dikenal dengan *good government* atau yang disebut dengan *e-government*.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Dengan adanya

Undang-Undang No 23 tahun 2014, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah yakni Pemandagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang terdapat pada Pasal 14 ayat (3) tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis sistem informasi perencanaan.

Sistem Informasi Perencanaan adalah alat pengaturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Kabupaten/ Provinsi menjadi selesai dengan mudah, cepat, akurat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan dengan keberadaan alat *e-planning*, Pengembangan Regional (Xiao, 2018 dan Zagonari, 2018). Perencanaan dapat memaksimalkan sistem dan sistem ini juga mampu menghadirkan analisis yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan (Ebrahimi, 2018 dan Okamuro & Nishimura, 2018) Upaya untuk meningkatkan proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan sistem informasi perencanaan melalui *e-planning* pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Secara Online (*e-Planning*) Provinsi Riau. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 1) memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem *e-planning* bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah, 2) menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah, 3) mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan

pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan 4) mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

Penerapan *e-planning* ini tidak berlangsung lama, seiring dengan besarnya tuntutan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, *e-planning* melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 bertransformasi menjadi sistem perencanaan pembangunan yang dikenal dengan RKPD Online. RKPD online merupakan sebuah sistem informasi hasil dari pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang selama ini berada pada wilayah penganggaran, namun telah dikembangkan sampai pada tatanan perencanaan.

Dinamisasi penerapan *e-planning* tidak hanya sampai disitu, Untuk penyusunan RKPD 2021 Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang diberi nama *Integrated Planning (I-Planning)*, namun belum sampai *i-planning* diimplementasikan untuk menyelesaikan RKPD 2021, Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Dalam Negeri.

Sangat dinamisnya platform aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan tentu sangat membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan itu sendiri, baik dari kalangan eksekutif yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan jajarannya maupun dari kalangan legislatif. Jajaran Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari berbagai

organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk dalam proses perencanaan, organisasi perangkat daerah memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh segenap Sumber Daya Manusia Aparatur perangkat daerah tersebut.

Rosemary Cafasaro dalam O'Brien (2009:138) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi antara lain: dukungan manajemen eksekutif/ manajemen puncak, keterlibatan end user (sumber daya manusia), kejelasan penggunaan kebutuhan organisasi, kematangan perencanaan dan harapan organisasi yang nyata. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem informasi antara lain: kurangnya input dari end user, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif serta inkompetensi secara teknologi.

Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Pengertian menurut Abdul Kadir (2014:9), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Pengertian menurut Krismiaji (2015:15) sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah

serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Handoko (2003:77) mengatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Sedangkan Conyer dan Hill dalam Tarigan (2012:5) mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Beranjak dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi sistem informasi perencanaan merupakan pelaksanaan sebuah sistem yang ada pada sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat kombinasi yang terdiri dari kumpulan orang, fasilitas, teknologi bahkan cara kerja atau metode sehingga menciptakan alur komunikasi dan data serta memproses beragam tipe kejadian internal maupun eksternal yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam penentuan keputusan berdasarkan data informasi yang terdapat dalam sistem tersebut.

Dukungan Manajemen Eksekutif

Manajemen tertinggi atau sering disebut pula manajemen puncak (top management) atau eksekutif kunci, misalnya dewan direktur, direktur utama, presiden direktur, dan para pejabat eksekutif lainnya. Manajemen puncak bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas dan melakukan pengambilan keputusan strategis.

Deni Dermawan dan Kunkun (2013:95) menjabarkan dukungan manajemen sebagai berikut: "Manajemen puncak dalam mendukung sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem, mereka sering kali menentukan atau mempengaruhi arah perkembangan sistem informasi, juga

bertindak sebagai pemakai sistem karena sangat memperhatikan kondisi perusahaan secara keseluruhan, manajemen puncak biasanya menginginkan ringkasan informasi untuk mendukung aktivitasnya saat melakukan perencanaan, analisis dan keputusan strategis.”

Menurut Chenhall dalam Wildoms (2015), dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi. Dukungan manajemen puncak tidak hanya penting untuk alokasi sumber daya yang diperlukan, melainkan memberikan sinyal yang kuat bagi karyawan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan suatu yang penting. Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan akan berpengaruh pula pada kepuasan pengguna.

Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/ organisasi, definisi menurut Nawawi dalam Iznillah (2015:6) sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan). Menurut Werther dan Davis (dalam Sutrisno, 2012: 4) sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai ukuran-ukuran untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang diadaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan dari Sedarmayanti (2009:53) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan fisik (kesehatan)
2. Kemampuan non fisik, yang meliputi

- a. Kemampuan Intelektual (kecerdasan)
- b. Kemampuan Psikologis (mental)

Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan saluran komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video (Sawyer dalam Kadir, 2013:2). Teknologi informasi tidak sekadar berupa teknologi komputer tetapi juga mencakup teknologi komunikasi atau dapat dikatakan teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.

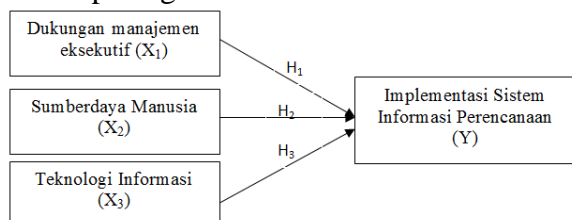
Dari pengertian diatas dapat diartikan teknologi informasi merupakan segala bentuk perangkat yang digunakan berupa perangkat keras komputer (*hardware*), perangkat lunak komputer (*software*) dan teknologi komunikasi serta perangkat pendukung lainnya dalam mendukung proses implementasi sistem pembayaran transaksi non tunai.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berusaha baik itu melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan paperbased administration menuju electronic government atau *e-government*. *Electronic government* atau sering disebut dengan *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Menurut Laudon (2015:21) untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi, umumnya dibutuhkan setidaknya tiga unsur utama, yaitu: 1. Perangkat keras (*hardware*) 2. Perangkat lunak (*software*) 3. Manusia (*brainware*).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis permasalahan yang mempengaruhi implementasi sistem informasi perencanaan pada Provinsi Riau atau faktor yang mempengaruhi diantaranya dukungan manajemen eksekutif, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono(2017:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017: 8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi penelitian adalah organisasi perangkat daerah (OPD) pada instansi pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang ruang lingkup kerjanya berada di bidang perencanaan. OPD pada instansi pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau berjumlah sebanyak 36 OPD.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik yang diambil yaitu

sampling jenuh (sensus). Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 36 OPD, setiap OPD sudah ditentukan berjumlah 4 orang responden yaitu satu orang sampel pada tiap jenis jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan di masing-masing perangkat daerah (sekretaris, kasubag, staf perencana dan fungsional perencana).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component based structural equation modeling*. Menurut Ghazali & Latan (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (*prediction*). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan software SmartPLS. SmartPLS menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya *bootstrapping* maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau outer model dan model struktural (*structural model*) atau inner model.

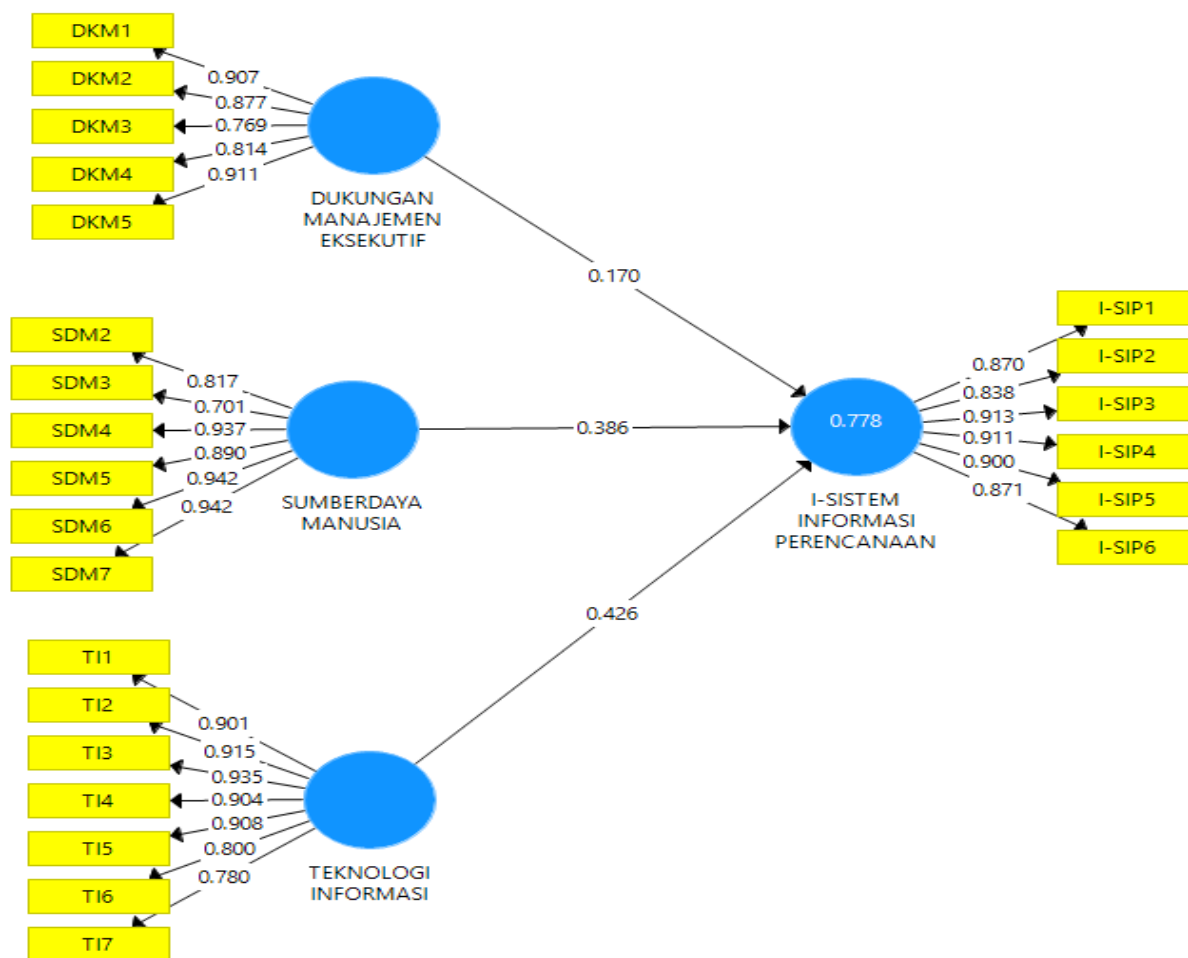
HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan manajemen eksekutif, sumber daya manusia (SDM),

dan teknologi informasi terhadap implementasi sistem informasi perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau.

Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas kontruk dan reliabilitas instrumen. Terdapat tiga nilai yang harus diperhatikan pada tahap ini yaitu pengujian

validitas dengan melihat nilai *convergent validity* dan *discriminant validity* serta uji reliabilitas dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Berikut hasil pengujian *convergent validity* disajikan pada gambar 2 berikut:



Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Gambar 2

Hasil Analisis Alghorithm Loading Factor

Berdasarkan gambar dari 1 diatas dapat diperoleh nilai R Square implementasi sistem informasi perencanaan sebesar 0,778. Artinya adalah sebesar 77,8% variabel implementasi sistem informasi perencanaan dipengaruhi oleh dukungan manajemen eksekutif, sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) akan memperlihatkan empat hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test) pada setiap jalur pengaruh antara variabel. Dalam PLS

pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrapping* terhadap sampel, pengujian dengan *bootstrapping* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah pada data penelitian. Hipotesis penelitian ini menggunakan alpha 5% dengan nilai t tabel (df = N-2 = 80-2 = 78) sebesar 1,991 (Latan dan Ghazali, 2012:85). Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Partial Least Square

No	Pengaruh	Original Sample	Sample Mean (M)	T Statistics	P Value
1	Dukungan Manajemen Eksekutif => Implementasi Sistem Informasi Perencanaan	0,170	0,165	1,993	0,047
2	SDM Implementasi => Sistem Informasi Perencanaan	0,386	0,396	3,991	0,000
3	Teknologi Informasi => Implementasi Sistem Informasi Perencanaan	0,426	0,424	7,704	0,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Dari tabel 1 diatas maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Diperoleh nilai t-statistik 1,993 dan P value 0,047. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (1,993) lebih besar dari t table (1,991) dan P value (0,047) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan cara pengambilan keputusan hipotesis pada bab 4, maka dengan demikian H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Ini membuktikan bahwa dukungan manajemen eksekutif berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi perencanaan. Diperoleh koefisien sebesar 0,170 yang berarti bahwa setiap peningkatan dukungan manajemen eksekutif sebesar satu satuan maka akan meningkatkan implementasi Sistem Informasi perencanaan sebesar 0,170 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Diperoleh nilai t-statistik 3,991 dan P value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (3,991) lebih besar dari t table (1,991) dan P value (0,000) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan cara pengambilan keputusan hipotesis pada bab 4, maka dengan demikian H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Ini membuktikan bahwa SDM berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi

perencanaan. Diperoleh koefisien sebesar 0,386 yang berarti bahwa setiap peningkatan SDM sebesar satu satuan maka akan meningkatkan implementasi sistem informasi perencanaan sebesar 0,386 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Diperoleh nilai t-statistik 7,704 dan P value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik (7,704) lebih besar dari t table (1,991) dan Diperoleh nilai P value 0,000, hasil tersebut menunjukkan P value (0,000) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan cara pengambilan keputusan hipotesis pada bab 4, maka dengan demikian H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Ini membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan. Diperoleh koefisien sebesar 0,426 yang berarti bahwa setiap peningkatan teknologi informasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan implementasi sistem informasi perencanaan sebesar 0,426 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

PEMBAHASAN

Merujuk pada hasil penelitian dan analisa terhadap variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020 didapat pengaruh besar dan seperti apa pengaruh yang diberikan variabel-variabel tersebut pada implementasi sistem informasi perencanaan. Berikut ini hasil penelitian dan penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut.

Pengaruh Dukungan Manajemen Eksekutif Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Manajemen tertinggi atau sering disebut pula manajemen puncak (*top management*) atau eksekutif kunci, misalnya dewan direktur, direktur utama, presiden direktur, dan para pejabat

eksekutif lainnya. Manajemen puncak bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas dan melakukan pengambilan keputusan strategis.

Menurut Hasmi (2004) adalah sebagai berikut: Pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem Informasi.

Dukungan dan keterlibatan manajemen eksekutif memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi. Dukungan manajemen puncak tidak hanya penting untuk alokasi sumber daya yang diperlukan, melainkan memberikan sinyal yang kuat bagi karyawan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan suatu yang penting. Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan akan berpengaruh pula pada kepuasan pengguna.

Hipotesis pertama (H1) menduga terdapat pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau, hipotesis ini mendapatkan dukungan secara statistik tabel 5.9 mempersentasikan nilai t-statistik yang diperoleh berdasarkan pengujian terhadap dukungan manajemen puncak menggunakan program SmartPLS, diperoleh pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di pemerintah Provinsi Riau sebesar 0,170 atau 17,0%. Hasil ini mengindikasikan bahwa manajemen eksekutif sudah memiliki sikap atau perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Diterimanya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa ada beberapa faktor yang

menyebabkan kesuksesan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi antara lain: dukungan manajemen eksekutif/ manajemen puncak, keterlibatan end user (sumber daya manusia), kejelasan penggunaan kebutuhan organisasi, kematangan perencanaan dan harapan organisasi yang nyata. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem informasi antara lain: kurangnya input dari end user, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif serta inkompetensi secara teknologi.

Keberhasilan suatu organisasi tidak akan terlepas dari dukungan manajemen puncak organisasi tersebut. Dukungan manajemen merupakan keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku dan pencapaian tujuan organisasi (Cooper, 2006). Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem Informasi. Dapat kita simpulkan bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak yang diberikan pada suatu SKPD, maka semakin baik jalannya implementasi SIMDA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dunuksetiawati (2015), yang meneliti tentang analisis faktor pendukung implementasi SIMDA dan kualitas laporan keuangan di Labuhan Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA. Agar program yang digunakan atau yang akan digunakan berhasil, dibutuhkan dukungan pimpinan atau atasan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dari pimpinan dalam memberikan respon terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan adalah cara yang paling efektif untuk mencapai kesuksesan program tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sang Ayu Nyoman dan AANB Dwirandra (2013) yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berperan pada implementasi sistem informasi keuangan daerah. Hasil penelitian Julian Aristo (2017) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak mempengaruhi kesuksesan implementasi ERP secara signifikan. Hasil penelitian ini juga senada dengan penelitian Kartana (2008), Cerullo (1980) dalam Choe (1996), dan Perdana (2011) dan Fitri (2012) yang mengungkapkan dukungan manajemen puncak berpengaruh pada keberhasilan implementasi sistem informasi.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam penerapan suatu sistem. Perlu untuk lebih meningkatkan kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas yang memberi dampak secara langsung terhadap pengalaman (Parulian dan Nurianna, 2008).

Hipotesis ketiga (H2) menduga terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau, hipotesis ini mendapatkan dukungan secara statistik tabel 5.9 mempersentasikan nilai t-statistik yang diperoleh berdasarkan pengujian terhadap sumber daya manusia menggunakan program SmartPLS, diperoleh pengaruh sumber daya manusia terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di pemerintah Provinsi Riau sebesar 0,386 atau 38,6%. Hasil ini mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki kompetensi yang baik, sehingga proses implementasi sistem informasi perencanaan dapat berjalan dengan efektif.

Diterimanya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti penjelasan dalam bab sebelumnya,

suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Desi Indriasari, 2010).

Kompetensi seseorang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan tugas yang diembannya akan selalu mendorong pegawai tersebut untuk bekerja dengan efektif, efisien dan produktif. Hal ini penting karena dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, maka harus dikelola dan diurus oleh manusia yang memiliki kompetensi seperti aspek-aspek penting pelatihan, pengembangan, dan motivasi.

Selain itu, diterimanya hipotesis ini juga didukung oleh teori Edwards III (1980) menjelaskan bahwa dalam pengimplementasikan kebijakan perlu adanya sumber daya yang mempengaruhi tingkat keefektifan sebuah implementasi. Sumber daya tersebut adalah diperlukannya staf yang memadai serta memiliki keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Hal ini juga sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi salah satunya sumberdaya. Selanjutnya dalam teori Merilee S. Grindle (1980) menyatakan bahwa sebuah program harus didukung oleh sumberdaya yang memadai. Pernyataan ini menggambarkan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya yaitu sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan, sumberdaya manusia juga termasuk objek kebijakan publik itu sendiri.

Dengan adanya sumberdaya manusia yang kompeten seperti memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi maka diharapkan kinerja implementasi sistem informasi perencanaan akan semakin baik dan berjalan dengan

efektif. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa sumber daya memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem informasi perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau.

Melihat uraian tersebut di atas, maka kualitas sumber daya manusia yang bermutu sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena dengan adanya manusia-manusia yang bermutu, berintelektual, memiliki keterampilan serta memiliki fisik yang sehat sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi sistem informasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Suhendri (2019) yang menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap implementasi transaksi non tunai. Jika dilihat dari penelitian yang menggunakan variabel Kompetensi SDM sebagai salah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Maka hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sudiarianti (2015) yang menemukan bahwa Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Teknologi informasi atau perangkat pendukung dapat dikatakan sebagai alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, software, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rostami dan Mongadam (2010) seperti dikutip dari Mohammad Alfian (2014; 1.699) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat sistem informasi akuntansi (SIA) terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output informasi yang dapat melemahkan kinerja organisasi.

Teknologi informasi selain sebagai penyimpanan informasi juga berfungsi penyebaran informasi sangat dibutuhkan

dalam keterandalan laporan keuangan hal ini dibuktikan oleh penelitian Desi Indriasari (2010) hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penerapan implementasi transaksi non tunai peran teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dan dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi pemerintah daerah dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.

Hipotesis ketiga (H3) diduga terdapat pengaruh teknologi informasi implementasi sistem informasi perencanaan (berupa gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak dan manusia (pemakai) yang diintegrasikan melalui teknologi komunikasi, hipotesis ini mendapatkan dukungan secara statistik. Hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh teknologi informasi terhadap variabel implementasi sistem informasi perencanaan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pengujiannya menggunakan program SmartPLS, diperoleh pengaruh teknologi informasi terhadap implementasi sistem informasi perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau sebesar 0,426 atau 42,6 %. Hal ini menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap variabel implementasi sistem informasi perencanaan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin besar dukungan manajemen eksekutif yang ditunjukkan oleh pimpinan SKPD dalam bentuk perhatian terhadap kinerja sistem informasi perencanaan, indikator ini akan meningkatkan

pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.

2. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan yang berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki fungsi perencanaan, maka implementasi perencanaan yang dilaksanakan cenderung semakin baik.
3. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin baik teknologi informasi yang digunakan oleh SKPD dalam bentuk teknologi dan informasi yang digunakan untuk sistem informasi perencanaan, indikator ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizon. (2018). *The Influence Of Strategic Management, Top Management Support And Users Competency To Accounting Information System Quality And Their Impact's To Accounting Information Quality*. Bandung: Padjadjaran Bandung University
- Aristo, Julian (2017). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Manajemen Proyek dan Keterlibatan Pengguna Terhadap Tingkat Kesuksesan Implementasi Enterprise Resource Planning Pada Perusahaan di Jabodetabek. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 2, No. 2, Juni 2017 : 147-154. ISSN 2527 – 7502
- Belout, Gauvreau, A. &., & Clothilde. (2004). *Factors influencing Prospect success: the impact of Human Resources Management*. International Journal of Project Management, 1-11
- Cahyadi et. al. (2020). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1 2020*
- Ghozali Imam, Latan H. 2012. *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibi Muhammad. 2018. *Evaluasi Implementasi Sistem E-Planning di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Pendekatan Metode PEGI*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hasan et. al. (2019). *The Government Readiness For E-Planning Implementation To Development Planning in Indonesia With Budget Availability As Intervening Variable*. *International Journal of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 04, April 2019*
- Hartijasti, Y (2011). *Top management commitment in enterprise resources planning implementation success : Premilinary study in Indonesia state-owned enterprise*. *Journal of Information Technology Applications & Management*, 18 (3), 42-59
- Instruksi Presiden No. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Juniawan Dedi Wawan. 2019. *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada*

- Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol 5 No.3 pp285-293.
- Kalembang Eric, Alwi, Arianto. 2019. E-Planning Dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *KINESIK* Vol.6 No.2.
- Paat Patrick Harry, Edward Fredrik Tuju, Meily Kalalo. 2018. Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, Vol. 02, No. 02, 2018, 11-15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Secara Online (e-Planning) Provinsi Riau
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Online Provinsi Riau
- Rubiyanto. 2019. Implementasi Kebijakan E-Government Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.2 No.1.
- Sani et. al. (2017). Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Volumen 9 Nomor 1, Juni 2017
- Tripalguna, Nyoman Aditya (2012). Pengaruh Perananan Manajemen Puncak Terhadap Kesuksesan Implementasi Enterprise Resource Planning (Studi Kasus Perum Peruri). Tesis Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pada Pasal 391 Tentang Pemerintahan Daerah Wajib Menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Zhang, L., Lee, M. K. O., Zhang, Z. & Banerjee, P. (2002). Critical Success Factors of Enterprise Resource Planning Systems Implemenation Success in China, *Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Science*